

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN-BARANG MILIK NEGARA-PENGGUNAAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 87/PMK.06/2016 TANGGAL 23 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 791

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dan dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penggunaan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 246/PMK.06/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, diubah sebagai berikut:  
Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, yaitu tentang kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.  
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, yaitu tentang Permohonan penetapan status Penggunaan BMN, dan pengecualian terhadap BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat.  
Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus.  
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, yaitu tentang dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan penetapan status Penggunaan dari Pengguna Barang, dan Penetapan status Penggunaan BMN dilakukan melalui keputusan Pengelola Barang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pengelola Barang.  
Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dihapus.  
Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, yaitu tentang Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.  
Ketentuan Pasal 27 diubah, yaitu tentang Perjanjian Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sekurang-kurangnya harus memuat beberapa kriteria.  
Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat.

Ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ketentuan ayat (5) Pasal 37 diubah.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37 A, yaitu tentang Dalam rangka optimalisasi Penggunaan BMN,. Pengelola Barang dapat melakukan alih status Penggunaan BMN tanpa adanya permohonan dari Pengguna Barang dengan memberitahukan kepada Pengguna Barang.

Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4A, serta di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2016 dan diundangkan pada tanggal 24 Mei 2016.
  - Lampiran : 18 Halaman